



Daerah Mitra Mengusulkan Rp 3 Triliun

Pengawasan dilakukan LSM tanpa lelang.

JAKARTA—Pemerintah DKI Jakarta kembali menganggarkan dana hibah untuk wilayah mitranya. Kali ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 menetapkan angka yang cukup besar, yaitu Rp 3 triliun untuk lima wilayah di sekitar Ibu Kota.

Lima daerah itu, menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ialah Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Dari kelima kota tersebut, Kota Tangerang mendapat kucuran terbesar, yakni Rp 2,4 triliun. "Tangerang dapat yang besar," ujar dia saat dihubungi kemarin.

Uang sebesar itu, kata bekas Wali Kota Jakarta Utara tersebut, harus digunakan oleh wilayah mitra untuk membantu Jakarta mengatasi berbagai hal. Salah satunya adalah mengatasi masalah banjir. "Dananya untuk perbaikan saluran yang bersinggungan dengan Jakarta," ujarnya.

Selain itu, Heru menambahkan, dana digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Pembangunan jalan yang menghubungkan Jakarta dengan kota satelit menjadi prioritas. "Jalan ke Jakarta juga perlu diperbaiki," ujar dia.

Menurut Heru, dana hibah untuk daerah mitra Ibu Kota itu meningkat dibanding tahun lalu. Sayangnya, dia tak menyebutkan nilai bantuan yang diberikan tahun lalu. "Pasti meningkat," kata dia. Sebab, total dana hibah dan bantuan sosial meningkat dari Rp 5 triliun menjadi Rp 7,2 triliun.

Meski kelima daerah itu

bakal mendapat kucuran dana dari DKI, Heru geram atas sikap pemerintah daerah penerima. Ia menyebutkan ada beberapa daerah yang belum menyerahkan surat pertanggung-jawaban (SPJ) ke DKI ihwal dana bantuan tahun lalu. Heru kembali tak mau menyebutkan daerah mana yang belum menyerahkan SPJ. "Tidak perlu diekspose," kata dia.

Padahal, menurut Heru, SPJ merupakan syarat mutlak bagi daerah jika ingin mendapat bantuan dari DKI. Dia mengaku memberi tenggat ke daerah yang belum menyerahkan SPJ tahun lalu sampai akhir Januari atau Jumat kemarin. Sebab, DKI bakal menyerahkan draf APBD 2015 ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Namun daerah tak mematuhi ultimatum pemerintah DKI. "Kalau tidak menyerahkan SPJ, mereka dapatnya di APBD Perubahan," kata dia.

Heru mengatakan daerah yang dapat bantuan dari DKI merupakan daerah yang tertib aturan. Jika tak mengikuti aturan DKI, ia memastikan daerah tersebut tak bakal mendapat dana dari pemerintah DKI. "Daripada kita yang repot nanti tersangkut hukum," ucap dia menyebutkan alasannya.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, menilai dana bantuan untuk daerah penyangga rawan penyelewengan dan bisa dikorup oleh pejabat daerah. Sebab, pengawasan terhadap bantuan tersebut sangat

minim. "Pengawasan dari DKI kurang," kata dia.

Bahkan Uchok heran atas kebijakan DKI yang menunjuk sebuah lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi dana bantuan tersebut. Yang lebih aneh, kata dia, LSM tersebut ditunjuk langsung tanpa melalui mekanisme lelang. "LSM yang dipilih harus punya integritas bukan yang hanya cari duit doang," ujarnya. Namun sayangnya, dia tak mau menyebutkan nama LSM tersebut.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, membantah kabar bahwa pengawasan dana bantuan ke daerah penyangga hanya dilakukan oleh LSM. Inspektorat, ujar dia, pun turut mengawasi. "Kami akan hati-hati dan terus awasi bantuan tersebut."

● ERWAN HERMAWAN